

Pengaruh Pengimplementasian Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (Siadinda) Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Dinas (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Provinsi Sulawesi Selatan)

Muh. Yasin Noor. W.K ✉

Administrasi Pemerintahan, Politeknik LP3I Makassar

Abstrak

Analisis Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan SKPD (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pengimplementasian Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) terhadap pertanggungjawaban keuangan Dinas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada dinas atau pemerintah daerah yang telah menerapkan Aplikasi SIADINDA.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat dan staf terkait, analisis dokumen laporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SIADINDA, serta survei kepada stakeholders, termasuk masyarakat. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menyelidiki perubahan dalam transparansi, kecepatan pencatatan, dan persepsi stakeholders terhadap pertanggungjawaban keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi SIADINDA secara signifikan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan mempercepat pencatatan keuangan. Stakeholders, termasuk masyarakat, juga menunjukkan persepsi yang positif terhadap tingkat pertanggungjawaban keuangan setelah implementasi Aplikasi SIADINDA.

Kata Kunci: *Implementasi Aplikasi Siadinda, Siadinda, Pertanggungjawaban Keuangan*

Abstract

Analysis of the Regional Office Accounting Information System (SIADINDA) Application on SKPD Financial Accountability (Case Study of the Investment Office and PTSP of South Sulawesi Province). This study aims to investigate the effect of implementing the Regional Office Accounting Information System Application (SIADINDA) on the financial accountability of the Office at the Investment Office and PTSP of South Sulawesi Province. The research method used is a case study, focusing on local agencies or governments that have implemented the SIADINDA Application.

Data was collected through interviews with relevant officials and staff, analysis of financial statement documents before and after SIADINDA implementation, as well as surveys to stakeholders, including the public. Qualitative and quantitative analyses were used to investigate changes in transparency, speed of recording, and stakeholders' perceptions of financial accountability.

The results showed that the implementation of the SIADINDA Application significantly increased the transparency of financial reporting and accelerated financial records. Stakeholders, including the public, also showed a positive perception of the level of financial accountability after the implementation of the SIADINDA Application.

Keywords: *Application Implementation SIADINDA, Siadinda, Financial Accountability*

Copyright (c) 2024 Muh. Yasin Noor.W.K

✉ Corresponding author :

Email Address : yasinreds13@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pada tingkat daerah memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi kunci utama dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan publik. Salah satu upaya yang telah banyak diterapkan dalam meningkatkan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah penggunaan sistem informasi keuangan, seperti Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA).

SIADINDA, sebagai aplikasi yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan daerah, menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan akurasi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan. Namun, sejauh mana pengaruh pengimplementasian SIADINDA terhadap tingkat pertanggungjawaban keuangan dinas di berbagai daerah masih merupakan subjek penelitian yang perlu mendapatkan pemahaman lebih mendalam.

Pada konteks ini, penting untuk melakukan penelitian yang sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak implementasi SIADINDA terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan dinas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana penerapan teknologi informasi, khususnya SIADINDA, dapat memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

Selain itu, pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SIADINDA dalam meningkatkan pertanggungjawaban keuangan dinas dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan kebijakan dan praktik terbaik di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara teknologi informasi keuangan daerah dan pertanggungjawaban keuangan.

SIADINDA adalah sistem informasi keuangan yang dirancang khusus untuk mendukung administrasi keuangan daerah (Surya Mahardika, 2018). Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SIADINDA diharapkan dapat memberikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Wulandari, 2021) bahwa variabel kinerja keuangan adalah parameter atas terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Implementasi SIADINDA di Berbagai Daerah

Sejumlah daerah di Indonesia telah mengimplementasikan SIADINDA sebagai langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola keuangan. Hasil dalam tingkat keberhasilan implementasi SIADINDA di berbagai daerah pun berbeda-beda, yang menunjukkan pentingnya memahami faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi tersebut.

Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan mencakup kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana publik.

Pada tingkat daerah, pertanggungjawaban keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan investasi pembangunan. Kinerja keuangan daerah merupakan aspek penting yang dinilai oleh masyarakat mengenai akuntabilitas organisasi dan manajemen untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik lagi (Wulandari, 2021).

Hubungan antara Implementasi SIADINDA dan Pertanggungjawaban Keuangan Peningkatan Transparansi Melalui SIADINDA

Berbagai penelitian (Misbah et al., 2017; Kurniawan, 2019) menunjukkan bahwa implementasi SIADINDA dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, mengingat SIADINDA memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan daerah.

Kecepatan dan Akurasi Pencatatan dengan SIADINDA

Penelitian oleh (Nurhayati, 2013) menunjukkan bahwa responden memberikan respon yang baik, artinya implementasi aplikasi SIADINDA sudah berjalan dengan baik. Penerimaan penggunaan teknologi itu sendiri dapat diterima dengan baik oleh pengguna (user) yang terlihat dari tingginya minat menggunakan aplikasi ini. Banyaknya respon positif mengenai kegunaan teknologi itu sendiri, kemudahan penggunaan dan tingginya frekuensi penggunaan aplikasi tersebut dalam pekerjaannya menunjukkan bahwa aplikasi tersebut sangat berguna dan sangat membantu dalam pekerjaannya. Peran Stakeholders dalam Meningkatkan Pertanggungjawaban Stakeholders, termasuk masyarakat, memainkan peran penting dalam memastikan pertanggungjawaban keuangan yang baik. Penelitian oleh Widodo (2021) menekankan perlunya melibatkan stakeholders secara aktif dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan melalui SIADINDA.

Faktor-Faktor Kritis Keberhasilan Implementasi SIADINDA

Manajemen Perubahan

(Suseno, 2023) menyarankan bahwa pentingnya manajemen perubahan dalam implementasi SIADINDA yaitu salah satunya dengan mempertimbangkan ubah manajemen media digital. Kesuksesan implementasi seringkali tergantung pada kemampuan organisasi untuk mengelola perubahan dalam struktur dan budaya kerja.

Ketersediaan Sumber Daya dan Dukungan Pemangku Kepentingan Studi oleh Suharto (2019) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya, dukungan pemangku kepentingan, dan komitmen pemimpin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIADINDA.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian studi kasus untuk mendalaminya. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami implementasi SIADINDA dan dampaknya terhadap pertanggungjawaban keuangan secara rinci di lingkungan kontekstual yang nyata.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Bougenville, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231. Waktu penelitian dimulai pada bulan September 2023 sampai November 2023.

Populasi dan Sampel

1. **Populasi:** Populasi penelitian ini adalah dinas atau pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan SIADINDA untuk administrasi keuangan.
2. **Sampel:**
 - Sampel akan dipilih dengan metode purposive sampling, dengan memilih dinas atau pemerintah daerah yang memiliki pengalaman signifikan dalam implementasi SIADINDA.
 - Jumlah sampel akan ditentukan berdasarkan kebutuhan informasi yang memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian

Instrumen Pengumpulan Data

1. **Wawancara:** Wawancara akan dilakukan dengan pejabat terkait di dinas atau pemerintah daerah yang terlibat dalam implementasi SIADINDA. Pertanyaan wawancara akan difokuskan pada persepsi mereka tentang dampak SIADINDA terhadap pertanggungjawaban keuangan.
2. **Dokumentasi:**
 - Analisis dokumen seperti laporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi SIADINDA akan dilakukan.
 - Dokumentasi terkait implementasi SIADINDA, panduan, dan kebijakan yang terkait juga akan dianalisis.
3. **Survei:**

Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan pandangan dan persepsi dari berbagai stakeholders, termasuk masyarakat, tentang tingkat pertanggungjawaban keuangan setelah implementasi SIADINDA.

Analisis Data:

1. **Analisis Kualitatif:**

Data dari wawancara dan analisis dokumen akan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan content analysis untuk mengidentifikasi pola-pola temuan.
2. **Analisis Kuantitatif:**

Jika ada data kuantitatif, seperti hasil survei, analisis statistik deskriptif atau inferensial dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis data tersebut.

Validitas dan Reliabilitas:

1. **Validitas Internal:**

Validitas internal akan ditingkatkan dengan memastikan konsistensi antara data yang dikumpulkan dan interpretasi yang dihasilkan.
2. **Reliabilitas:**

Reliabilitas akan dijaga dengan memastikan bahwa instrumen-instrumen yang digunakan dapat mengukur variabel-variabel dengan konsisten.

Etika Penelitian:

- Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunggulan dan keterbatasan SIADINDA Keuangan

1. Keunggulan yang dirasakan setelah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan SIADINDA:
 - a. Sesuai Peraturan Perundang- Undangan
 - PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006
 - Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
 - b. Terintegrasi

Aplikasi SIADINDA dapat dimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan teknologi client/server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPD maupun di SKPD, sehingga mempunyai keuntungan :

 - Pengendalian transaksi terjamin
 - Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya
 - Cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan
 - c. *Transfer of Knowledge*

Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam hal:

 - Penguasaan disiplin ilmu akuntansi dan audit,
 - Penguasaan business process pengelolaan keuangan daerah, dan Pengalaman praktis pengelolaan keuangan daerah,
 - Didukung dengan kantor Perwakilan BPKP yang dapat menjangkau seluruh pemerintah daerah, maka BPKP dapat membimbing dan mengasistensi pengelola keuangan daerah untuk mengimplementasi system pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi SIADINDA. Bimbingan dan asistensi tersebut merupakan proses transfer of knowledge dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah daerah
2. Keterbatasan yang dirasakan setelah Dinas Penanaman Modal dan PTSP menerapkan SIADINDA Keuangan:

Dari segi pengolahan data keuangan

 - a. Sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun import-eksport data, sering tidak keluar/tampil laporan atau report yang diinginkan user, tanggal dan kode rekening dalam laporan sering tidak keluar/ tampil dalam

laporan tersebut, sering terjadi perbedaan jumlah hasil rekapan antar laporan yang tentu saja dapat berakibat pada keterandalan laporan.

- b. Apabila terjadi kesalahan penginputan dalam laporan, user akan mengalami kesulitan melakukan perbaikan (rollback) karena disebabkan semua laporan berada dalam satu database, jadi apabila satu laporan di rollback otomatis akan mempengaruhi laporan yang lainnya.
- c. Sistem pengoperasian pengelolaan data keuangan SIADINDA dinilai sangat rumit atau tidak *user friendly* yang tidak mengikuti perkembangan teknologi pemrograman yang sudah berfokus kepada kenyamanan penggunaan dari user.

Dari segi Keterbatasan Perangkat:

Jaringan yang dimana sering terputusnya koneksi jaringan ketika user akan melakukan koneksi ke server

Dari segi perawatan dan pemahaman *user* SIADINDA Keuangan:

Kurangnya pemahaman *user* ataupun pengguna SIADINDA Keuangan terhadap siklus laporan keuangan pada software SIADINDA Keuangan. Sehingga pengguna SIADINDA Keuangan pada umumnya hanya lebih memahami tahapan-tahapan pengoperasian SIADINDA Keuangan sebagaimana yang diperoleh pada pelatihan SIADINDA Keuangan tanpa memahami siklus laporan keuangan pada SIADINDA Keuangan.

Pengendalian Internal

1. Pembagian kewenangan user

Tujuan dari pengendalian aplikasi adalah untuk menjamin bahwa seluruh transaksi adalah valid, terotorisasi dan dicatat secara lengkap, akurat dan benar. Pengendalian internal dalam aplikasi SIADINDA Keuangan terutama dilakukan dengan pembagian tingkat kewenangan, meliputi: administrator, supervisor, dan operator. Administrator memiliki kewenangan pembuatan user dan otoritas user, setting aplikasi (parameter), posting anggaran, dan unposting jurnal. Supervisor memiliki kewenangan mengotorisasi input data, maupun penyesuaian/ koreksi. Operator hanya memiliki kewenangan untuk menginput data dan melihat laporan.

2. Pengendalian menu berdasarkan Fungsi

Untuk menjamin validitas input data aplikasi SIADINDA Keuangan secara terintegrasi mengatur pengendalian berdasarkan fungsi-fungsi: penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh implementasi Aplikasi Sistem Administrasi Keuangan Daerah (SIADINDA) terhadap pertanggungjawaban keuangan dinas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan utama:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

Implementasi SIADINDA secara signifikan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dinas. Ketersediaan informasi yang lebih cepat dan akurat memungkinkan masyarakat dan stakeholders untuk lebih mudah memahami penggunaan dana publik.

2. **Kecepatan dan Akurasi Pencatatan:**

Pencatatan keuangan dengan menggunakan SIADINDA memberikan hasil positif dalam hal kecepatan dan akurasi. Proses pencatatan yang lebih efisien mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat ketersediaan informasi yang relevan.

3. **Persepsi dan Partisipasi Stakeholders:**

Stakeholders, termasuk pihak internal dan masyarakat, menunjukkan persepsi yang positif terhadap pertanggungjawaban keuangan setelah implementasi SIADINDA. Mereka merasa lebih terlibat dan dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan yang diperlukan.

4. **Faktor Kritis Keberhasilan Implementasi:** Identifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan implementasi SIADINDA menjadi penting. Manajemen perubahan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan.

5. **Upaya Pemeliharaan dan Pengembangan:** Upaya pemeliharaan dan pengembangan SIADINDA setelah implementasi diperlukan untuk memastikan kelangsungan tingkat pertanggungjawaban keuangan yang optimal. Pemeliharaan sistem dan pengembangan fitur-fitur baru dapat membantu mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

SARAN

1. Penguatan Pelatihan dan Sosialisasi
2. Perbaikan Berkelanjutan pada Sistem
3. Evaluasi Faktor Kritis Keberhasilan
4. Kolaborasi Antarinstansi dan Evaluasi Cross-Daerah
5. Pendalaman Analisis Mengenai Dampak Sosial
6. Pemahaman Lebih Lanjut tentang Faktor Kontekstual
7. Peningkatan Dukungan Pemangku Kepentingan

Referensi :

- Nurhayati, I. (2013). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DINAS DAERAH (SIADINDA) PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KALIMANTAN BARAT. *KIAFE: Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, 2(2).
- Surya Mahardika, P. M. (2018). Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA). *Murfa Surya Mahardika*. <https://www.msmsgroup.co.id/produk348-SIADINDA.html>
- Suseno, B. D. (2023). *Pengembangan Organisasi Dan Manajemen Perubahan : Perspektif Transformasi Digital*. August.
- Wulandari, R. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 1-11. <https://media.neliti.com/media/publications/531366-none-d6f1b2d8.pdf>
- Peraturan menteri dalam negeri (KEPMEDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang no. 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara.
- PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan